KPM 321 – KAJIAN AGRARIA

**STRUKTUR AGRARIA & KRISIS EKOLOGI**

POKOK BAHASAN

1. Introduksi
2. Kerusakan Lingkungan: dari masalah Ekologi menjadi Politik-Ekonomi.
3. Simplifikadi Kerusakan Lingkungan Sebagai Warisan Kolonial
4. Pendekatan Politik-Ekonomi Dalam Analisa Kerusakan Lingkungan
   1. Metoda *Placed based Analysis*
   2. *Non-Placed based Analysis*
   3. Pedekatan *buttom-up* dari *Placed & Non-Placed Analysis*
5. INTRODUKSI

Krisis Ekologi dipicu oleh kompleksitas berbagai factor, salah satu yang paling penting adalah tingkat intervensi manusia kedalam ekosistem lingkungan alamnya. Pada gilirannya intensitas intervensi manusia ini dimungkinkan oleh kombinasi dari berbagai factor, seperti: peningkatan pengetahuan dan teknologi, peningkatan penduduk dan pola settlement, berkembangnya skala dan sofestikasi dari organisasi social politik dalam mengatur dan memobilisasi penduduk, perkembangan perdagangan. Seberapa jauh struktur agrarian dan sistim tenurial mempunyai andil didalam mendorong krisis ekologi? Pertanyaan ini akan kita bahas dengan memanfaatkan buku yang sudah menjadi klasik dari Piers Blaikie, The Political Economy of soil Erosion in Developing Couontries. Longman, London & NY, 1985. Blaikie mengkhususkan studinya pada degradasi tanah dan erosi. Untuk memperkaya mata ajaran Kajian Agraria, saya memanfaatkan pendekatan Blaikie ini untuk permasalahan lingkungan yang lebih luas.

1. KERUSAKAN LINGKUNGAN: DARI MASALAH EKOLOGI MENJADI POLITIK-EKONOMI.

Menurut Blaikie Beberapa faktor membuat kerusakan lingkungan menjadi subyek perdebatan yang tidak kunjung selesai:

1. Sukar mendapatkan data yang akurat dan dari berbagai penjuru dunia, untuk waktu yang panjang.
2. Sukar memisahkan faktor manusia sebagai penyebab kerusakan lingkungan dari faktor-faktor lain, seperti perubahan iklim, proses alamiah yang masih berjalan.
3. Ragam cara pandang terhadap fenomena kerusakan lingkungan dan degradasi tanah. Ahli tanah, sejarahwan, ilmuan sosial – semua punya cara pandang dan pendekatan sendiri-sendiri atas permasalahan lingkungan.

Namun menurut Blaikie lebih penting adalah pemahaman bahwa, penggambaran dan penerangan prihal kerusakan lingkungan – apa,faktor penyebabnya, dsb. – pada umumnya merupakan produk dari pihak-pihak yang berkuasa, terutama negara. Di dalam hal ini, negara tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingannya. Indonesia dapat kita jadikan contoh. Pada dekade pertama pemerintahan Orde Baru, penyebab kerusakan hutan diterangkan sebagai dampak dari ulah masyarakat peladang berpindah, yang serta merta dijuluki sebagai perambah hutan. Atas dasar definisi ini, solusi yang diterapkan adalah program-program resettlement penduduk. Dimana masyarakat adat dipaksa meninggalkan kawasan hutan dan agroforestry yang sudah dikelola bergenerasi, pindah ke desa-desa gabungan yang lebih besar di daerah yang lebih mudah diakses pemerintah dan mengadopsi sistim pertanian menetap/intensif. Program resettlement penduduk seperi ini tidak dapat dilihat berdiri sendiri, karena berkaitan langsung dengan pengukuhan konsep kawasan hutan negara, serta kebijakan exploitasi kehutanan sekala besar oleh penanam modal dalam dan luar negeri.

Karena itu menurut Blaikie, sekali kerusakan lingkungan didefinisikan oleh negara (atau pihak-pihak kuat lainnya), yang sarat dengan kepentingan – maka pada saat itu kerusakan lingkungan bukan lagi permasalahan ekologis namun sudah berubah menjadi permasalahan politik-ekonomi dan dengan demikianpun solusinya sudah ditentukan. Seandainya Blaikie menulis bukunya satu dekade lebih kemudian, mungkin dia dapat memili pengertian politik-ekologi yang merupakan padanan dari politik-ekonomi namun lebih fokus pada permasalahan lingkungan.

1. SIMPLIFIKASI KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI WARISAN KOLONIAL

Simplifikasi kerusakan lingkungan merupakan warisan kolonial yang sampai kini masih menguasai cara pandang pejabat negara dan pemodal besar. Simplifikasi permasalahan kerusakan lingkungan dapat dikenali dari berapa ciri:

1. Masalah erosi lebihdipandang sebagaimasalah lingkungan, ketimbang masalah sosial yang kompleks. Hubungan kekuasaan kolonial memungkinkan bahwa permasalahan sosial diabaikan.
2. Atribut kolonial kedua, adalah meletakkan kesalahan secara exklusif pada pengguna tanah, yang didefinisikan sebagai malas, terkebelakang, irasional, dsb.
3. Mengkaitkan isu erosi dengan overpopulation.
4. Salah satu patokan kebijaksanaan adalah mengintegrasikan petani dan peternak lebih banyak kedalam ekonomi pasar.

Belakangan Evaluasi diri dari pengambil kebijakan, mengungkapkan kekurangan dari pendekatan penanggulanganmasalah kerusakan lingkungan yang selama ini diterapkan, seperti: 1) Banyak teknik konservasi tidak sesuai dengan praktik pertanian dan peternakan dimana teknik konsevasi tersebut diterapkan, sehingga program-program gagal. 2) terdapat kelemahan kelembagaan, terutama koordinasi diantara instansi pemerintah.

Evaluasi diri ini menurut Blaikie (ibid.:5) tetap tidak mendudukan permasalahan secara lebih fundamental, seperti: 1) bahwa kemungkinan besar permasalahan degradasi tanah harus dicari diluar daerah yang terkena bencana; 2) bahwa negara tidak netral, dan kerena itu tidak menyelesaikan permasalahan secara rasional dan imparsial. 3) dan selalu ada yang menang (diuntungkan) dan yang kalah (yang dirugikan) didalam hal kerusakan lingkungan dan konservasi.

2. PENDEKATAN POLITIK-EKONOMI DAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pendekatan Politik-Ekonomi dari degradasi tanah/lingkungan menghadapi tantangan besar dalam menyatukan studi-studi yang esesnsinya mengenai proses-proses phisik dan sosial dan yang bersandar pada *epistemologi* dan *ideologi* ilmu bio-phisik dan ilmu sosial yang berbeda.

Pendekatan Politik-Ekonomi ini harus mencakup:

1. Analisa “place-based” 🠊 analisa pada tingkat dimana permasalahan kerusakan lingkungan terjadi, dampaknya berupa banjir, degradasi tanah, dimana petani menjadi korbannya. Tekanan analisa adalah pada manifestasi phisisk dari kerusakan lingkungan dan aspek spasialnya seperti *land use*. Karena itu analisa pada tingkat ini spesifik lokasi dan konjungtural. Namun, penting untuk peka terhadap pengaruh dari proses-proses di “tempat lain” – manajemen lingkungan yang baik di satu tempat (misalnya perkebunan modern yang dikelola dengan baik) bisa jadi dibangun dengan menggusur petani-petani yang semula mendiami daerah perkebunan tersebut ke tanah-tanah marginal. Penyebab kerusakan lingkungan di tanah-tanah marginal tersebut umumnya hanya dibebankan pada para petani gusuran, tanpa memperhatikan akar sebenarnya – yaitu pembatasan akses tanah petani dan penyingkiran petani dari sumberdaya agraria yang semula dikuasainya.

Pembatasan akses dan penyingkiran dapat dilakukan melalui beberapa cara: 1) membuat petani menjadi penggarap tanah ilegal dengan menentukan bahwa tanah tanah tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan negara. Proses ini disebut juga sebagai proses *exclusion*; 2) mengintegrasikan tanah petani kedalam perkebunan atau pertambangan dengan skim-skim kemitraan atau dengan membeli tanah petani. Umumnya proses ini dilakukan dengan berbagai bentuk intimidasi yang mendapat dukungan bahkan tidak jarang legitimasi dari Pemerintah Daerah.

1. Analisa “Non-place-based” 🠊 analisa relasi produksi –*hubungan ekonomis, sosial dan politik antara pihak-pihak* – yang langsung mempengaruhi penggunaan tanah, seperti:

pajak, harga jual produk pertanian, kebutuhan tenaga kerja, akses pada tanah dan input pertanian yang timpang; faktor-faktor ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penggunaan lahan *yg dapat membawa dampak degradasi tanah*: dimana tanah digunakan, teknologi yang digunakan, tanaman yang dibudidayakan, tenaga kerja yang digunakan, kebutuhan untuk mencari nafkah diluar pertanian, dsb.

Dua moda analisa tersebut diatas – placed-based dan non-placed based – dilakukan pada berbagai tingkat, dimulai dari bawah (*buttom up)* dari tingkat analisa dan unit analisa paling kecil, yaitu rumah-tangga, sampai dengan tingkat negara dan bahkan global:

1. Tingkat unit analisa paling kecil, yaitu rumah-tangga petani(RT) – fokusnya pada strategi pemanfaatan lahan, dan politik RT (misalnya proses berdasar gender yang menentukan kuasa dan pembagian kerja atas tanah, gender, pembagian kuasa didalam RT);
2. Pada tingkat organisasi sosial politik diatas pengambilan keputusan RT, seperti adat, clan, marga, kelompok tani – fokusnya pada pengaruh pengambilan keputusan diatas RT, seperti akses pada tanah komunal, aturan-aturan lokal prihal menanam apa, dimana, dan kapan;
3. Pada tingkat negara - bagaimana negara dan instansi2 pemerintah mempengaruhi strategi RT melalui program pembangunan, pajak, harga pasar, peraturan/per-UU, serta pengaruhnya melalui hubungan kelas (*class power relations*, seperti kebijaksanaan yang mendukung kepentingan kelas petani kaya, atau pemodal besar di dalam akses pada tanah, input pertanian, dsb.);
4. Pada tingkat global – dinamika harga komoditi export pertanian, krisis ekonomi dunia, expansi modal besar memperoleh konsesi luas atas tanah atau sumberdaya agraria (seperti halnya investasi kedalam pertanian pangan skala besar – terkenal dengan istilah “land-grab”).

*Surplus Extraction* dan Kerusakan lingkungan 🠊

Melalui proses-proses yang disebut “non-place-based” (lihat point 2 diatas) tersebut surplus/keuntungan dihisap dari petani oleh pihak-pihak seperti negara, pedagang, pengusaha perkebunan, dsb. Proses penghisapan keuntungan dari petani ini, disebut “surplus extraction”. Intensitas surplus extraction ini dapat mempengaruhi intensitas pemanfaatan sumberdaya oleh si petani. Bila surplus extraction ini sangat membebani, petani mempunyai pilihan: 1) meningkatkan pemerasan tenaga kerja anggota RTnya sendiri (self exploitation) atau 2) meningkatkan intensitas pemanfaatan tanah pertaniannya. Seringkali petani terpaksa melakukan keduanya, hanya untuk dapat menghidupi keluarganya. Namun pilihan untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan tanah pertanianya lambat atau cepat akan menguras kesuburan tanahnya. Dalam kata lain medorong degradasi tanah.

Disini dapat kita lihat bahwa fenomena degradasi tanah tidak dapat diterangkan sepenuhnya oleh sistim pertanian yang diterapkan petani. Untuk bagian yang besar – malah boleh dikatakan akar permasalahannya – terletak pada timpangnya hubungan produksi antara petani dengan pihak-pihak luar. Pajak yang terlalu membebankan petani, bargaining position/posisi tawar dari petani yang lemah, kewajiban sosial dan biaya tinggi dari berbagai aspek kehidupan (uang sekolah dihapus namun murid wajib menggunakan berbagai seragam, sepatu, beli buku, biaya berbagai kegiatan sekolah; biaya jasa kesehatan yang tinggi; dsb.). Tingginya biaya pertanian disebabkan juga oleh buruknya infrastruktur pertanian, yang pada gilirannya merupakan akibat tidak ada tekanan pada pemerintah untuk mengeluarkan dana untuk itu. Kebijakan pangan murah bagi penduduk kota, dapat merugikan petani juga. Hal tersebut dapat merupakan konsekwensi dari tidak adanya kekuatan politik yang mewakili kepentingan petani di dalam maupun di luar kelembagaan negara.

Dengan mengintegrasikan berbagai aspek – yang land-based dan non-land based – dan menganalisanya pada berbagai tingkatan – dari tingkat RT sampai dinamika global – pendekatan Politik-Ekonomi dapat menguak faktor-faktor yang lebih mendasar sebagai akar dari kerusakan lingkungan.

---------------- \*\*\*\* ----------------